

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI KELURAHAN KANDAI DUA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU

Muhammad Aprian Jailani , ¹ Nadia Sabrina ²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Mataram
Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Abstrak

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pengalaman individu. Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi langsung, dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data dalam kajian fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu tidak harus ikut sebagai panitia pengawas pemilu, namun perempuan juga dapat terlibat dalam pengawasan Pemilu dengan melalui kegiatan-kegiatan internal kelompok seperti arisan, pertemuan rutin, pelatihan dan kegiatan lainnya. Di Kelurahan Kandai Dua, perempuan masih perlu meningkatkan kesadaran mereka dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, terutama dalam hal praktik demokrasi yang menjadi permasalahan utama selama pemilu berlangsung. Dapat disimpulkan keterlibatan perempuan di Kelurahan Kandai Dua sudah ada bentuk keterlibatan seperti memberi dukungan berupa tindakan, berbagi informasi serta memberi ajakan dan mengarahkan.

Kata Kunci: Partisipasi, Perempuan, Pengawasan

Abstract

This research uses a type of qualitative research with a phenomenological approach, namely research that aims to gain a deeper understanding of individual experiences. Data collection techniques used in this research are interviews, direct observation, documentation. The data analysis technique used in this research is the data analysis technique in phenomenological studies. The research results show that women can be involved in election supervision without having participate as an election supervisory committee, but women can also be involved in election supervision through internal group activities such as social gatherings, regular meetings, training and other activities. In Kandai Dua Subdistrict, women still need to increase their awareness in participating in election monitoring, especially in terms of democratic practices which are the main problem during the elections. It can be concluded that women's involvement in Kandai Dua Subdistrict has taken the form of involvement, such as providing support in the form of action, sharing information as well as giving invitations and directing. However, self-awareness and commitment are still lacking.

Keywords: Participation, women, supervision.

PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan sebuah bentuk keterlibatan aktif baik individu, kelompok, atau organisasi yang terjadi dalam suatu kegiatan atau proses untuk berkontribusi dan mengemukakan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang

dapat menghasilkan kebijakan yang adil, berkelanjutan dan sesuai dengan keinginan seseorang. Penting untuk diketahui bahwa partisipasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung akan keterlibatan masyarakat. Maka dapat diketahui bahwa partisipasi seseorang maupun kelompok masyarakat dapat ikut terlibat dalam berbagai kegiatan di bidang kehidupan salah satunya dalam bidang politik.

Dalam ranah politik, partisipasi dapat dilakukan oleh

Alamat Korespondensi Penulis: mataram

Nama : **Muhammad Aprian Jailani**

Email : aprianjaelani@gmail.com

Alamat: Kampus Universitas Muhammadiyah
Mataram, Jln. KH. Ahmad Dahlan No. 1
Pagesangan Mataram. Kode Pos. 83115.

warga negara melalui berbagai cara, seperti menjadi pemilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai politik, menjadi penyelenggara pemilihan umum, menjadi relawan pemilihan umum, atau bergabung dalam kelompok kepentingan. Partisipasi dalam politik memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan, meningkatkan kesadaran politik warga negara, memperkuat demokrasi, dan memastikan pemenuhan hak politik. Untuk mendorong partisipasi politik yang lebih luas dan inklusif, penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dengan menyediakan akses yang adil terhadap informasi politik, memberikan pendidikan politik yang efektif, melakukan pemantauan yang transparan terhadap proses politik, serta menghapus hambatan sosial dan struktural yang dapat menghalangi partisipasi individu, kelompok, atau organisasi tertentu.

Penjelasan mengenai hal tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022. Peraturan ini mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Peraturan ini mencakup tujuan dan prinsip partisipasi masyarakat, pelaksanaan partisipasi masyarakat oleh masyarakat serta KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, pemantauan pemilihan, peran pemerintah dan pemerintah daerah, dan sistem informasi yang digunakan dalam menunjang pelaksanaan partisipasi masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat baik individu, kelompok, atau organisasi dapat terlibat dalam pelaksanaan pemilihan umum dalam berbagai peran seperti sebagai pemilih, penyelenggara pemilu, maupun kelompok kepentingan lainnya.

Dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu, masyarakat yang sebagai pemilih dalam pemilu juga dapat ikutserta dalam berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu, salah satunya mengawasi jalannya proses pemilu dari tahapan awal hingga tahapan akhir. Seperti diketahui

bahwa pengawasan partisipasi merupakan sebuah bentuk keikutsertaan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pemilu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, mewujudkan integritas penyelenggaraan pemilu, dan memastikan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Maka, dalam pengawasan partisipasi pemilu diperlukan masyarakat yang aktif dalam melakukan pengawasan pemilu, salah satunya yaitu perempuan. Keterlibatan perempuan menurut Kusdianita, dkk (2022:65) memiliki peran yang penting dalam memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa proses politik merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, diperlukan identifikasi kesadaran, kesepahaman terhadap kebutuhan atau kepentingan yang sama, serta komitmen yang kuat dari masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan dialog dan diskusi yang terbuka, serta membangun kerjasama yang baik antara masyarakat dan pihak terkait. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan dari berbagai uraian diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan umum di Kelurahan Kandai Dua. Dengan salah satu aspek terpenting yaitu bentuk keikutsertaan dari perempuan di Kelurahan Kandai Dua dalam mengawasi jalannya pemilu tahun 2024.

Di Kelurahan Kandai Dua, terdapat beberapa kelompok perempuan yang aktif seperti Kelompok PKK, Kelompok Pengajian, Kelompok Pedagang, Kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), Kelompok Wanita Tani (KWT), Kelompok Senam, dan Kelompok Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP). Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, bahwasannya

perempuan di Kelurahan Kandai Dua untuk kesadaran dan komitmen berpartisipasi dalam kegiatan politik terutama dalam pengawasan masih kurang. Namun, hingga saat ini belum ada kesadaran diri dan komitmen terhadap kepentingan yang sama dari tiap-tiap perempuan dalam setiap kegiatan politik terutama dalam kegiatan pengawasan jalannya pemilu serentak tahun 2024.

Di Kelurahan Kandai Dua, kurangnya minat dalam kegiatan politik dan pandangan bahwa politik bukanlah dunia perempuan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi. Hambatan ini menyebabkan keterbatasan akses dan partisipasi perempuan, terutama terhadap perempuan, terhadap sumber daya seperti pendidikan, teknologi, media massa, dan ruang publik untuk menyuarakan pandangan mereka secara efektif. Dampaknya adalah kemampuan mereka dalam menjangkau audiens yang lebih luas menjadi terpengaruh. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik yang berkaitan dengan hak-hak perempuan.

Perlu diingat bahwa tidak hanya persoalan keterbatasan akses dan partisipasi yang menjadi kendala, tetapi perempuan juga seringkali dianggap kurang kompeten atau memiliki otoritas yang rendah dalam menyampaikan informasi politik. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi oleh kelompok perempuan dalam berpartisipasi dalam pengawasan pemilu di Kelurahan Kandai Dua adalah isu kompleks yang melibatkan para perempuan dalam pengawasan pemilu serentak tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Partisipasi Perempuan Dalam Pengendalian Dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field*

Research), yaitu penelitian yang dilakukan pada masyarakat yang sebenarnya atau lapangan kehidupan masyarakat yang bertujuan menghimpun data / informasi tentang masalah tertentu mengenai kehidupan masyarakat yang menjadi obyek penelitian. Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan dengan Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Desa di Desa Masbagik Utara Baru, kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam penelitian ini, narasumber atau informan dipilih dengan menggunakan tehnik snowball sampling, dimana peneliti bisa secara langsung menentukan siapa yang akan diwawancarai dilapangan akan tetapi bisa bertambah sesuai dengan kebutuhan data dilapangan ibarat bola salju yang menggelinding menjadi semakin besar. Untuk memudahkan dalam pengambilan data dilapangan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu, Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang di selidiki, selanjutnya metode Interview merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual, dan yang terakhir adalah metode Dokumentasi adalah Untuk melengkapi data yang diperoleh dengan menggunakan metode interview dan metode observasi. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah surat yang tertulis atau tercetak tentang fakta-fakta yang akan dijadikan sebagai bukti fisik penelitian dan hasil penelitian dan hasil dokumentasi ini menjadi sangat akurat dan sangat kuat kedudukannya.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Setelah data diolah dan diklasifikasi, maka tahap berikutnya data tersebut akan dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dari rangkaian yang bersifat khusus yang di ambil dari individu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kelurahan Kandai Dua

1. Perkembangan Serta Letak Geografis Masyarakat Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Adapun hasil temuan oleh peneliti di profil kelurahan tentang struktur yang mencakup data-data perkembangan atau banyaknya masyarakat di kelurahan Kandai Dua kecamatan woja kabupaten dompu. sedangkan Kecamatan Woja adalah salah satu kecamatan dari delapan kecamatan yang ada di kabupaten Dompu, Provinsi Nusatenggara Barat (NTB). Jumlah penduduk Kota Woja tahun 2023 mencapai 52.815 jiwa, merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di Kabupaten Dompu, melebihi jumlah penduduk Kota Dompu. Luas wilayah Kota Woja mencapai 301,16 km², sehingga kepadatan penduduk mencapai 175 jiwa per km².

Kecamatan Woja memiliki berbagai macam potensi desa, terutama di Kelurahan Kandai Dua yang masih bisa untuk di kembangkan di antaranya jumlah penduduk, jumlah ternak besar, pendidikan, serta fasilitas kesehatan yang terdapat di wilayah kecamatan woja yang hanya saja sistem yang di gunakan masih belum sesuai, serta masih banyak lagi sumber daya alam yang masih bisa di kembangkan lagi di wilayah kecamatan woja. Oleh karna itu pemerintah di kecamatan woja ingin melakukan perkembangan dan meningkatkan suatu sistem yang bisa membantu semua hal yang digunakan atau yang sering terjadi di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja.

2. Mata Pencaharian yang sering dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Di dalam suatu daerah yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan penduduk, baik ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Oleh karena itu, penduduk merupakan bagian yang sangat

berpengaruh dalam perkembangan dan kemajuan di suatu daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Dompu pada tahun 2023 berjumlah 260.622 jiwa, yang terdiri dari 130.505 jiwa laki-laki dan 130.117 jiwa perempuan.

Masyarakat Simpasai memiliki mata pencaharian berbeda-beda. Secara garis besar mata pencaharian masyarakat disana seperti petani dan peternak, itu disebabkan karena berlimpahnya ketersediaan lahan pertanian, sehingga mendukung itu juga mendukung ketersediaan untuk pakan ternak dan masyarakat Simpasai banyak yang PNS, TNI/POLRI dan pedagang.

3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

Data mengenai jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan digunakan untuk merencanakan kebijakan pembangunan ekonomi, mengidentifikasi sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih, serta mengukur tingkat lapangan kerja dan pengangguran. Berikut data tabel menunjukkan jumlah penduduk menurut pekerjaan yang ada di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Tabel 1.1 Data Jumlah Masyarakat Yang Berkerja Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

N O	NAMA TEMPAT	JUMLAH
1	Petani	2.350 orang
2	Peternak	1.780 orang
3	PNS	790 orang
4	Wirasaha	1.360 Orang

4. Partisipasi

Menurut Irwan, Latif dan Mustanir (2021) dalam setiap pelaksanaan kegiatan pertemuan, masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan kontribusi, saran, dan kritik. Partisipasi tersebut merupakan suatu kegiatan keikutsertaan yang penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu. (Irwan, Latif, and Mustanir 2021)

Sedangkan, menurut pendapat Ni Ketut Arniti (2020) dalam pelaksanaan pemilihan umum, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mereka dalam memberikan dukungan melalui hak suara dan secara aktif mengawasi proses penghitungan suara pada pemilihan umum legislatif tahun 2014. (Arniti 2020) Maka, partisipasi masyarakat merupakan bentuk keterlibatan aktif seluruh warga

dalam berbagai aspek kehidupan di lingkungan mereka. Hal ini mencakup pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan masalah atau topik yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan tercipta kehidupan yang lebih demokratis dan berkelanjutan.

Menurut Kadek Cahya Susila Wibawa (2019), terdapat urgensi keterlibatan masyarakat dalam pemantauan pemilu tidak hanya akan memperkuat kapasitas pemantauan penyelenggaraan pemilu, tetapi pengawasan masyarakat sipil (civil society) juga akan memfasilitasi peningkatan pengawasan.

Partisipasi melibatkan aktivitas individu atau kelompok dalam berbagi pemikiran, pendapat, kerja sama atau tindakan yang mendukung tujuan bersama. Oleh karena itu, partisipasi sangat penting untuk mendorong inklusi sosial dan memberikan kesempatan bagi setiap individu atau kelompok untuk menentukan nasib mereka sendiri serta memperkuat demokrasi.

5. Kelompok Perempuan

Kelompok perempuan adalah sekelompok individu yang memiliki identitas gender perempuan dan dapat bergabung dengan organisasi atau komunitas yang berfokus pada isu-isu perempuan, seperti kesetaraan gender dalam pemilihan umum (pemilu).

Terdapat berbagai kelompok perempuan yang telah membentuk forum saling berbagi informasi dan ide dalam rangka terlibat dalam kegiatan publik. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Dengan adanya forum ini, diharapkan perempuan dapat lebih aktif dan terlibat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. (Alfiyah and Rika 2022)

Seringkali, kelompok perempuan menjadi tempat bagi para anggotanya untuk mendapatkan dukungan spiritual. Mereka memberikan ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman hidup sebagai perempuan dan saling memberikan dukungan moral dan sosial. Kelompok-kelompok ini dapat bersifat lokal atau global, seperti organisasi perempuan lokal, kelompok yang mempromosikan hak-hak perempuan, organisasi

nonpemerintah yang berfokus pada isu-isu perempuan, dan gerakan feminis.

Sejumlah kelompok perempuan dan emak-emak turut menunjukkan dukungannya dalam kampanye kreatif pemilihan presiden dan wakil presiden 2019 sebagai bentuk partisipasi dalam ajang demokrasi. Sikap politik dan dukungan mereka menjadi bagian dari kreativitas yang mereka tunjukkan untuk merayakan demokrasi dan memperoleh dukungan publik. (Mahyuddin, Mustary, and Nisar 2020)

6. Pengawasan

Proses pengawasan melibatkan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap operasi atau aktivitas tertentu guna memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan dari proses yang telah ditetapkan.

Menurut Ratnia Solihah, Arry Bainus, dan Rosyidin (2018) dalam pemilu, pengawasan dan peran masyarakat merupakan komponen penting yang harus terlibat untuk memastikan hak politik warga terlindungi dan untuk menentukan kepemimpinan politik serta mengevaluasi kinerja pemimpin. Dengan adanya pengawasan yang efektif, organisasi atau kelompok dapat mengenali potensi masalah sejak awal, melakukan perbaikan jika diperlukan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengawasan memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam sistem.

Menurut Kurniawansyah dan Alqadri (2021) dalam konteks pemahaman kepemiluan, pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu adalah suatu kebutuhan mendasar yang harus dilakukan untuk mengendalikan semua aktivitas terkait pemilu guna mencapai pemilu yang berkualitas dan demokratis.

Menurut pendapat Riyadi dan Kurnadi (2020) pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan yang telah

ditetapkan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah disusun. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi di masa lalu dan mengambil tindakan korektif guna memperbaikinya.

Tujuan pengawasan dalam pelaksanaan pemilu adalah untuk menjamin bahwa proses pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau manipulasi yang dapat mengancam hasil pemilu yang sah dan akurat. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan masyarakat dapat memperoleh hasil pemilu yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

7. Pemilihan Umum

Penjelasan menurut Yulia Sariwati dan Rahmawati (2019: 150- 151) pemilihan umum merupakan suatu proses penting dalam menjalankan sistem demokrasi, di mana setiap warga negara memiliki kesempatan untuk secara langsung berpartisipasi dalam menentukan pemimpin, arah, dan kebijakan yang akan mempengaruhi masa depan negara selama lima tahun ke depan.

Sedangkan, pemilihan umum dapat didefinisikan menurut Nur Wardhani (2018: 60) merupakan sarana demokrasi yang penting untuk membentuk sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan sesuai dengan keinginan rakyat melalui pelaksanaannya dilakukan dengan representasi politik serta persaingan yang sehat dan transparan.

Pemilihan umum telah menjadi kompetisi antara partai politik atau calon perseorangan dalam merebut posisi pemerintahan. Persaingan antar partai ini diyakini dapat meningkatkan akuntabilitas dan memberikan pilihan terbaik bagi pemilih. Oleh karena itu, pemilihan umum biasanya diadakan secara berkala, seperti pemilihan presiden, parlemen atau kepala daerah. Prosesnya dengan melibatkan beberapa tahapan, seperti kampanye politik oleh

kandidat atau partai politik yang bersaing, pencalonan kandidat, debat publik antar kandidat dan penghitungan suara serta pengumuman pemenang.

Hal itu diperjelas oleh Nugroho dan Sukmariningsih (2020: 25) pemilihan umum merupakan proses yang dilakukan untuk memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Proses ini dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luberjurdil).

Berdasarkan penjelasan dan pemahaman mengenai pemilihan umum (pemilu), dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pemilu adalah memberikan hak pilih kepada warga negara agar mereka dapat aktif berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik dan demokrasi. Selain itu, pemilihan ini juga berfungsi sebagai kontrol sosial bagi para pemimpin yang dipilih secara populer.

Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan oleh Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

Pada Sub Pembahasan ini dapat diuraikan mengenai temuan data di lapangan yang dihasilkan Berdasarkan Hasil Wawancara yang dilakukan oleh Peneliti, ada beberapa hal yang peneliti temui di lapangan. Untuk dapat mengetahui hasil penelitian melakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam peningkatan partisipasi politik oleh Organisasi Kesatuan Perempuan di Kelurahan Kandai Dua, baik itu pertanyaan yang ditanyakan kepada ketua Organisasi Kelurahan Kandai Dua maupun ke kaum perempuan yang terlibat didalam Program Kegiatan Organisasi Kelurahan Kandai Dua yang ada di Kabupaten Dompu.

Dalam hal ini, peningkatan partisipasi politik yang dilakukan dengan melalui tahap kegiatan dalam Kegiatan pendidikan Politik, sehingga Kegiatan Pendidikan politik bagi perempuan harus mempunyai arah yang jelas menuju pada kemampuan kaum

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528-0953

perempuan yang memiliki kekuatan penyadaran akan pentingnya pembebasan kaum perempuan terhadap marginalisasi politik terhadap kaumnya, sehingga kaum perempuan memiliki jati diri yang kuat dalam kiprah politiknya. Pendidikan politik perempuan bertujuan untuk membebaskan perempuan dari ketidak-setaraan perlakuan dan bukan bertujuan pada kekuasaan atau penguasaan (dominasi), sebagaimana yang dilakukan. Namun pemberdayaan politik perempuan tidak boleh disusupi oleh pemahaman politik kapitalis yang justru memposisikan perempuan untuk bersaing dengan laki-laki dalam perebutan kekuasaan. Pemberdayaan politik perempuan terikat dengan kodratnya untuk memperhatikan keseimbangan peran utamanya sebagai wanita (ibu) dengan peran politiknya. Peran politik bagi perempuan adalah bagian dari tanggung jawabnya terhadap masyarakat luas sedangkan peran wanita (keibuannya) adalah kewajiban utamanya dalam mendampingi suami dan mendidik anak-anaknya guna menciptakan generasi yang berkualitas.

Meskipun saat ini politisi perempuan sudah mulai bermunculan, namun dalam kenyataan belum begitu besar pengaruhnya dalam memperjuangkan aspirasinya. Politisi perempuan sangat diharapkan bisa memberikan warna dan penyeimbang dalam kiprahnya di dunia politik. Tetapi karena masih kurangnya jam terbang, basis pengalaman dan pendidikan politik yang kurang memadai, juga karena faktor sosial dan budaya. Secara sederhana dapat ditarik akar permasalahannya pada kurangnya pendidikan politik bagi perempuan. Untuk itu jalan yang harus ditempuh terlebih dahulu untuk menciptakan kesadaran politik perempuan dalam meningkatkan peran politiknya adalah dengan memberikan pendidikan politik sesuai dengan makna yang sebenarnya, sehingga dalam kancah politik, perempuan mempunyai peran dalam mengembangkan demokrasi dan cerdas dalam menentukan sikap politiknya.

Pelaksanaan Kegiatan partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik,

kegiatan kampanye, ikut dalam partai politik dan lain sebagainya, perilaku politik masyarakat itu sendiri dapat dilihat ketika masyarakat tersebut ikut berpartisipasi, misalnya dalam pemilu. Rakyat membuat kontrak sosial dengan para pemimpin melalui pemilu. Pada saat pemilu rakyat dapat memilih figure yang dapat dipercaya untuk mengisi jabatan legislative dan eksekutif. Di dalam pemilu, rakyat yang telah memnuhi syarat untuk memilih, secara bebas, dan rahasia, menjatuhkan pilihannya pada figure yang dinilai sesuai dengan aspirasinya.

Kegiatan partisipasi politik perempuan merupakan suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh karena itu perlu dilandasi dengan peningkatan partisipasi politik demi berhasilnya suatu pencapaian yang dilakukan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua. Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi pendidikan politik karena didalam kegiatan sosialisasi juga terdapat pemberian bekal pengetahuan tentang pendidikan dalam berpolitik, seperti bagaimana mekanisme pemberian suara pada pemilihan umum, dan bagaimana juga mencegah adanya money politik dan belajar juga untuk mencari pemimpin yang sesuai dengan kemauan masyarakat, khususnya untuk para perempuan agar sesuai dengan hak pilih mereka, seperti halnya mempunyai hak untuk berpolitik, menyuarakan aspirasi untuk ikut berkontribusi dalam memilih pemimpin untuk kemajuan baik itu untuk Negara maupun untuk masing masing daerah.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teori partisipasi politik dalam mengatasi permasalahan politik perempuan, Partisipasi politik perempuan itu sendiri merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses

pembentukan kebijakan umum. Menurut Myron Wiener, sifat sukarela dari partisipasi adalah tidak adanya unsur pemaksaan, termasuk partisipasi perempuan politik yang dilakukan oleh para komunitas kaukus perempuan politik.

Perempuan mempunyai hak untuk memilih wilayah publik dimana dia ingin berperan sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Ia pun berhak atas manfaat dari semua aktivitas politik yang dilakukan oleh negara dan partai politik. Secara umum, kesejahteraan lahir bathin merupakan aspirasi dan tujuan yang ingin dicapai seorang perempuan. Namun, berbagai kondisi baik kultural, sistemik dan ketidakberdayaan perempuan menjadi kendala baginya untuk mengakses haknya untuk berperan dan bersuara dalam politik. Untuk menjawab tantangan dan kendala ini diperlukan lembaga masyarakat, pemerintahan dan partai yang gender responsif dalam strategi dan properempuan dalam program-programnya. Pendekatan paling tepat untuk berkomunikasi dan menjangkau perempuan adalah dengan memberikan program yang tepat khususnya bagi perempuan, antara lain program pelatihan dan pendidikan politik yang mengembangkan kecerdasan berpolitik, membangun kepercayaan diri dan meningkatkan wawasannya. Program ini tidak dilakukan secara instant top-down, tetapi berkesinambungan dan partisipatif (people driven) dari bawah (bottom-up)

1. Partisipasi Politik

Partisipasi Politik pada dasarnya suatu masyarakat karena pada dasarnya setiap individu yang terlibat dalam politik menaruh harapan bahwa kebutuhan dan aspirasinya akan diperhatikan oleh para pemimpin dan perbuatan mereka akan mempengaruhi pembuatan kebijakan demi kebaikan bersama.

Pandangan ini Didukung oleh Pendapat Ibu Amperawati, yang menyatakan:

“Partisipasi politik dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat yang

bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan perubahan pola pikir”

Dalam proses peningkatan partisipasi politik diperlukan adanya sosialisasi, karena dengan adanya kegiatan sosialisasi ini Organisasi Kepal utara dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat dan juga diberikan motivasi akan pentingnya pendidikan politik. Sosialisasi tersebut dilaksanakan pada setiap bulan sekali kepada masyarakat di Kecamatan Kotabumi Selatan yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari masyarakat sekitar.

Hal ini sejalan dengan Pendapat dari Ibu Anggraina, yang menyatakan:

“Partisipasi politik itu sendiri, diantaranya melalui pemberian suara (voting behavior), diskusi politik, kegiatan kampanye, ikut dalampartai politik”.

Informan Kedua menganggap bahwa Partisipasi Politik kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus di capai, oleh karena itu perlu dilandasi dengan peningkatan partisipasi politik demi berhasil nya suatu pencapaian yang dilakukan oleh Organisasi (Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua), sehubungan dengan hal ini, Ibu Amperawati, juga memiliki pendapat yang hampir sama terkait dengan definisi partisipasi politik, yang menyatakan:

“Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan”

Partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas dari modernisasi politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan

mempengaruhi kehidupan warga negara, maka warga negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik.

Berangkat dari pemaparan sebelumnya, mengenai partisipasi politik, maka kita dapat mengetahui antara definisi satu dengan definisi yang lainnya yang saling berkaitan. Setidaknya terdapat dua hal yang dapat disimpulkan dari definisi partisipasi politik diatas, Pertama, Partisipasi sebagai keterlibatan dan keikutsertaan dalam pelaksanaan pemilihan umum, yang kedua, partisipasi politik sebagai aspek yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pemilihan umum dan dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dan berkontribusi.

a. Penyuluhan

Penyuluhan merupakan proses perubahan perilaku di kalangan masyarakat agar mereka tahu, mau dan mampu melakukan perubahan demi tercapainya peningkatan pemahaman.

Dalam Hal ini, Ibu Roslinawati mengungkapkan bahwa:

“Penyuluhan yang dilakukan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua bertujuan untuk Meningkatkan pengetahuan individu, kelompok, dan masyarakat sehingga dapat diterapkan perilaku dalam berpolitik”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Roslinawati, bahwa penyuluhan yang dilakukan juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Pendidikan dalam berpolitik.

b. Pelatihan

Pelatihan sebagai proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui

pengalaman belajar. Tujuannya adalah untuk mencapai kinerja yang efektif dalam setiap kegiatan atau berbagai kegiatan.

Dalam Hal ini, Ibu Anggraini mengungkapkan bahwa:

“Proses belajar sebuah wacana pengetahuan dan keterampilan yang diwujudkan untuk penerapan hasil belajar yang sesuai dengan tuntutan tertentu”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Anggraini, terkait dalam kegiatan pelatihan yang dilakukan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua tentang adanya pengetahuan politik kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang adanya politik.

c. Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu kegiatan menolong yang karena sesuatu sebab butuh didampingi. Tujuan utama dari pendampingan usaha adalah “kemandirian” pendampingan dilakukan agar terkontrol perkembangan telah adanya pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan.

Dalam Hal ini, Ibu Suratini, Mengungkapkan bahwa:

“Pendampingan yang dilakukan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua yang bertujuan untuk dapat mendampingi masyarakat terkait pada kegiatan pelatihan Pendidikan politik”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Suratini, bahwa pendampingan yang dilaksanakan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua dengan mendampingi masyarakat, dapat memberikan pengetahuan masyarakat tentang politik.

2. Pendidikan Politik

Pendidikan politik juga sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan paham kedaulatan rakyat atau demokrasi bahwa rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi.

Dalam hal ini, ibu amperawati mengungkapkan bahwa: “yang menjadi sasaran (Pendidikan Politik) yaitu masyarakat yang ada di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, dan diberikan bekal pengetahuan Pendidikan Adil Gender, Advokasi Dan Penguatan Jaringan Dan Kepemimpinan Perempuan”

Berdasarkan Pemaparan yang dilakukan oleh Ibu Amperawati terkait dengan pendidikan politik, Berawal dari kesadaran yang dilakukan oleh Kepala Utara kepada Para Perempuan di kecamatan kotabumi selatan yang pada saat itu berinisiatif dalam membentuk kelompok-kelompok diskusi dan membahas tentang permasalahan yang sedang dirasakan oleh perempuan yaitu kurangnya kesadaran pendidikan politik khususnya perempuan yang masih belum paham akan hak mereka dalam politik, salah satunya pemilihan umum mereka tidak menggunakan hak suara mereka untuk menentukan calon pemimpin, dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi rendah bahkan mereka di tidak tau karena adanya money politik.

Sehubungan dengan pendidikan Politik oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua, ibu Anggraini menjelaskan bahwa: “Kalau Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua dapat mengedukasi masyarakat mengerti apa itu pendidikan dalam politik dan mengapa masyarakat harus tau pendidikan politik itu”

Berangkat dari berbagai data yang peneliti peroleh di lapangan, Pendidikan Politik nya adalah masyarakat Kotabumi Selatan, pendidikan politik juga dimaksudkan untuk mengedukasi masyarakat, agar masyarakat cerdas dan pintar dalam berpolitik. Dan mulai pendidikan politik inilah masyarakat mengetahui serta menekuni nilai, norma dan symbol politik.

3. Sosialisasi Politik

Sosialisasi Politik yakni proses dimana seseorang mendapat sikap, orientasi dan nilai-nilai terhadap kehidupan politik yang berlangsung di dalam masyarakat. Dari segi metode penyampaian pesan, sosialisasi politik terbagi menjadi dua yaitu pertama pendidikan politik dan kedua indoktrinasi politik. Pendidikan politik yaitu proses dialog antar pendidik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai, norma dan symbol politik. Terkait dengan sosialisasi politik, Ibu Amperawati menyatakan bahwa:

“Saya dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat sekitar baik itu yang tergabung dalam kelompok organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua ataupun tidak kedalam kelompok Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua, itu

perlu saya sosialisasikan karena banyak sekali pembodohan ataupun ketidak tahuan masyarakat terkait pada money politik, maka itu sosialisasi ini juga bertujuan dapat memberikan perubahan pola piker masyarakat khususnya perempuan”

Berdasarkan Hasil Wawancara Dan Observasi yang dilakukan oleh Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua terkait pada sosialisasi juga bertujuan untuk mengubah pola piker masyarakat dan harus pintar memilih calon pemimpin, maka itu perlu diberikan bekal pengetahuan melalui program pendidikan politik, Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua tidak hanya memberikan pengetahuan saja tetapi dapat memberikan motivasi, agar para perempuan tidak mudah dalam menerima money politik, dan harus mempertimbangkan lagi dalam pemilihan umum baik itu Kepala Negara ataupun Kepala Daerah.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Rohaya yang pada saat itu ikut tergabung di Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua, menyampaikan bahwa:

“Pada saat itu, saya mengikuti kegiatan Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua yaitu mengikuti kegiatan Sosialisasi, di dalam kegiatan sosialisasi tersebut saya harus bisa memahami pendidikan dalam berpolitik”

Berdasarkan Hasil Wawancara, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh Organisasi Kepala Utara tersebut, menjadikan kegiatan yang bertujuan untuk dapat memberikan bekal pengetahuan masyarakat baik itu masyarakat didalam kelompok Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua maupun diluar dari pada kelompok Organisasi Kesatuan

Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua.

KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan beberapa hal terkait partisipasi politik perempuan khususnya ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu melalui hasil wawancara kepada beberapa responden, hasil yang dicapai adalah sebagai berikut :

1. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah perlu, sebab keberadaan mereka dapat meningkat kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan, namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota . Padahal hasil survei menyatakan masyarakat indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat dibidang politik. Oleh sebab itu, fakta-fakta, data dan bukti akan perlunya memberikan kesempatan bagi perempuan untuk duduk dalam parlemen. Partisipasi politik Perempuan dalam pemilu ada di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu cukup tinggi. Hal ini dapat dari kesadaran pihak perempuan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Bentuk partisipasi perempuan dalam kegiatan politik berupa aktif sebagai pemilih, mengikuti diskusi pemerintahan, sosialisasi pemilu maupun sebagai simpatisan partai politik. Partisipasi politik perempuan di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu terbentuk melalui sosialisasi dan berbagai informasi yang diterima dan dikelola dalam lingkungan social pemilih perempuan. Informasi-informasi yang ada akan membentuk bangunan Kognitif pemilih perempuan dan yang nantinya akan mendorongnya untuk

- memberikan informasi pada pilihan politiknya.
2. Pendidikan yang dialami oleh masyarakat melalui keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas partisipasi. Semakin aktif masyarakat muncul untuk terlibat dalam kegiatan partisipasi, semakin besar pula energi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perdebatan tentang berbagai isu kebijakan antar anggota masyarakat memunculkan semangat dan energi yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk menjadi lebih baik. Berbagai upaya partisipasi lainnya seperti demonstrasi, kehadiran dalam rapat-rapat terbuka, rapat-rapat, rapat-rapat mandiri yang diselenggarakan oleh masyarakat, gotong royong, lobi dan negosiasi pada dasarnya memunculkan vitalitas masyarakat dalam membangun daerahnya sendiri. Pada akhirnya sosialisasi politik maupun tingkat pendidikan sangat mempengaruhi dari partisipasi politik seseorang. Karena melalui proses pendidikan yang terus berjalan dan sosialisasi politik yang diterima akan membantu jalannya proses partisipasi yang akan dilakukan oleh masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik.

SARAN

Peneliti memberikan beberapa saran kepada piha-pihak yang terlibat dalam pemilukada tahun khususnya yang dilaksanakan Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu sebagai berikut :

1. Peningkatan akses informasi dan perluasan informasi mengenai proses pemilukada secara sistematis perlu dilakukan untuk mampu menjangkau pemilih-pemilih perempuan yang berada di daerah pinggiran dan dari berbagai kalangan dan lapisan sosial. Baik sosialisasi melalui media cetak audio atau audio visual. semina-seminar politik serta penyuluhan politik.
2. Peningkatan sosialisasi baik yang dilakukan oleh penyelenggara

pemilu, maupun partai politik akan memberikan sumbangsih bagi peningkatan partisipasi politik perempuan di Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu.

CAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya dan memberikan support terhadap saya supaya bisa menyelesaikan penelitian ini, dan terimakasih kepada teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan yang terbaik buat saya supaya saya terus berjuang melewati rintangan yang saya hadapi, Jurnal ini saya buat untuk orang-orang yang saya cintai dan saya sayangi.

DAFTAR PUSTAKA

1. Gabriel A. Almond, "Sosialisasi, Kebudayaan dan Partisipasi Politik", dalam Perbandingan Sistem Politik, peny. Mochtar Mas"oed dan Colin MacAndrews, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 61.
2. Rohaya, Anggota Masyarakat yang ikut bergabung di Organisasi Kesatuan Perempuan Di Kelurahan Kandai Dua, Wawancara 21 Maret 2024.
3. Alfiyah, N., & Rika, D. L. (2022). Pendidikan Politik Bagi Kelompok Perempuan di RT 01 RW 01 Desa Ellak Daya Kecamatan Lenteng Dalam Menghadapi Pilkada Serentak 2021. Darmabakti : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 3(1), 23–31.
4. Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 4(2), 329.
5. Bintari, A. (2022). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. Jurnal Keadilan Pemilu, 2(1), 13–22.
6. Hasanah, H. (2017). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). At-Taqaddum, 8(1), 21-46.
7. Irwan, I., Latif, A., & Mustanir, A. (2021). Pendekatan Partisipatif Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. GEOGRAPHY Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan, 9(2), 137–151.
8. Kurniawansyah, E., & Alqadri, B. (2021). Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Bagi Pemilih Pemula Pada Pilkada Di Kabupaten

Jurnal Poros Politik
ISSN : 2528-0953

- Sumbawa. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 4(2), 286–292.
9. Kusdianita, S., Hartana, M., Arsyad, M. Z., & Putri, Y. M. (2022). Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 59–69.
 10. Lailam, T., & Andrianti, N. (2021). Pendidikan Literasi Pemilu Bagi Perempuan Pemilih Pada Pemilu 2019. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 184–194.
 11. Lestarini, R. (2022). HAK POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM PADA MASYARAKAT ADAT BADUY. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1), 320-347.
 12. Mahyuddin, M., Mustary, E., & Nisar, N. (2020). The Power of Emak-Emak: Perempuan dalam Pusaran Kampanye Politik Pemilihan Presiden 2019. *AlMaiyyah : Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12(2), 1–15.
 13. Martien Herna Susanti dan Setiajidi. (2020). Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3*, 30–53.
 14. Mellaz, A. F. A. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Refleksi Pemilu Serentak 2019. December. Muharam, R. S., & Prasetyo, D. (2021). Pemenuhan Hak Politik Perempuan sebagai Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. *Jurnal HAM*, 12(2), 273.
 15. Novita, A., & Sari, M. M. K. (2019). Orientasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Jawa Timur Melakukan Literasi Politik Guna Mendorong Penguatan Perempuan Dalam Politik. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 07, 1268–1284.
 16. Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(01), 22.
 17. Nur Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 57.
 18. Prasetyo, E. (2017). Sistem informasi dokumentasi dan kearsipan berbasis clientserver pada bank Sumsel babel cabang Sekayu. *Jurnal TIPS: Jurnal Teknologi Informasi dan Komputer Politeknik Sekayu*, 7(2), 1-10.
 19. Ampera Wati, Ketua Kepala Utara, Wawancara 21 Maret 2024.
 20. Anggraina, Sekretaris Kepala Utara, Wawancara 21 Maret 2024.
 21. Anggraina, Sekretaris Kepala Utara, Wawancara 21 Maret 2024.
 22. Fadhallah, R. A. (2021). Wawancara. Unj Press.